

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DALAM Mendukung Capaian KESERTAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN SUBANG

Dedi

Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung
dedjahs@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah yang di biayai pemerintah pusat melalui dana DAK Subbidang KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana dalam mendukung capaian kesertaan Keluarga Berencana (KB) yang ada di Kabupaten Subang sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini menerapkan metode penelitian *mix methods* mengabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dengan bertujuan memperkuat analisa penelitian dengan menekankan pada metode kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum sesuai harapan. Indikasi yang menunjukkan adalah masih rendahnya tingkat pencapaian kesertaan KB dan serapan anggaran yang belum maksimal, yang hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, kemampuan melakukan komunikasi bagi petugas untuk melakukan konseling KB yang masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang berimbas pada rendahnya disposisi pada implementator. Saran yang dapat diberikan diantaranya meningkatkan ketersediaan sumber daya, penguatan koordinasi antar instansi, meningkatkan pendidikan dan kesadaran Masyarakat, monitoring dan evaluasi berkala, transparansi dan akuntabilitas anggaran dan kerjasama antar lintas sektor.

Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya.

ABSTRACT

The Operational Assistance for Family Planning (BOKB) is a government policy aimed at supporting the Population and Family Planning programs in regions, funded by the central government through DAK Family Planning Sub-sector funds. This study aims to understand the implementation of the Operational Assistance for Family Planning policy in supporting the achievement of family planning participation in Subang Regency and to identify and analyze the factors influencing policy implementation. Using a phenomenological approach, this research applies a mixed-methods methodology, combining quantitative and qualitative research methods simultaneously to obtain a comprehensive picture of the studied phenomenon. Emphasizing qualitative methods, the researcher concludes that the policy implementation has not met expectations. Indicators of this include the still low level of family planning participation and the suboptimal budget absorption. These issues are influenced by several factors, including the low

ability of officers to communicate and provide family planning counseling, the low quality of human resources affected by educational factors, and the resulting low disposition of implementers. Recommendations include increasing resource availability, strengthening coordination between agencies, enhancing education and public awareness, conducting regular monitoring and evaluation, ensuring budget transparency and accountability, and fostering cross-sector collaboration.

Keywords: *Communication, Disposition, Implementation, Policy, Resources.*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 48.274.162. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 24,51 juta orang penduduk laki-laki, yang menyumbang sekitar 50,77 persen dari populasi total Jawa Barat. Data demografis Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mencerminkan komposisi gender yang hampir seimbang, dengan sekitar 23,76 juta penduduk perempuan, atau sekitar 49,23 persen dari total penduduk, dari tahun 2010 hingga 2020, provinsi ini mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan, dengan penambahan sekitar 10.944.741 jiwa, atau rata-rata 729,65 ribu jiwa setiap tahun. Dengan kepadatan penduduk sekitar 1.365 jiwa per km² selama periode tersebut. Lebih lanjut, Kabupaten Subang di dalam provinsi ini juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dengan populasi mencapai 1,595 juta jiwa pada September 2020, menunjukkan penambahan sebesar 130.163 jiwa atau rata-rata 10.847 jiwa dibandingkan selama kurun waktu 2010-2020 adalah sekitar 1.05 persen.

Dari permasalahan tersebut pemerintah pusat melalui dana Alokasi Khusus memberikan anggaran untuk pemerintah daerah dalam membantu program kependudukan dan Keluarga berencana melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga berencana atau disingkat BOKB yaitu alokasi dana yang bersifat non-fisik dan khusus digunakan untuk mendukung program keluarga berencana (KB). Dana ini mencakup biaya operasional untuk Balai Penyuluhan KB, Dana Pengegerakan dan peyayanan KB serta bantuan dana untuk pendistribusian Alokasi dari gudang yang terletak di Kabupaten/Kota ke faskes yang membutuhkan. Selain itu, BOKB juga berperan dalam mendukung upaya penurunan angka stunting. Dana BOKB ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang termasuk dalam implementasi program KB, yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diantaranya Penggunaan untuk Program Bangga Kencana di tingkat lapangan.

Pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai sasaran dalam program Bangga Kencana di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan peraturan tercantum pada (Perpres) nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian RAPBN Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, implementasi BOKB dijabarkan melalui Perban BKKBN Nomor 13 Tahun 2022, yang berisi pedoman teknis dalam penggunaan dana tersebut untuk mendukung pencapaian target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,15 pada akhir tahun 2020 dan TFR 2,12 pada akhir tahun 2023. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memastikan akses yang lebih baik terhadap program keluarga berencana, di Provinsi Jawa Barat.

Sebuah program dan kebijakan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang esensial, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana disebutkan oleh birokrasi (Edward III 1980). Komunikasi memiliki peran

penting dalam menjelaskan dan menyampaikan implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Tifannii, Mayasari, dan Rifai 2020) menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kota Bekasi memiliki peran sentral dalam menjalankan komunikasi ini dengan masyarakat. Namun, komunikasi yang efektif juga memerlukan sumber daya yang unggul, baik dalam bentuk SDM yang berkualitas maupun sumber daya lainnya seperti fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik implementor kebijakan, juga memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat asumsi bahwa beberapa faktor memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Keluarga Berencana, terutama dalam meningkatkan partisipasi KB. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan pesan yang disampaikan oleh petugas kepada sasaran, yang dalam hal ini adalah Pasangan Usia Subur. Hal ini terjadi karena jumlah petugas penyuluh KB yang terbatas, serta kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan sesuai dengan arahan pembuat kebijakan di tingkat Kabupaten Subang yang masih perlu ditingkatkan. Disposisi dan struktur lembaga implementator juga belum optimal, masih dalam proses pencarian bentuk yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Semua faktor ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efektivitas program Keluarga Berencana di wilayah tersebut.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah seperangkat langkah, keputusan, dan strategi yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur, mempengaruhi, atau mengatasi berbagai bagian dari kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial, mengatasi masalah sosial, atau mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum (Dye 2013; Lajas dan Macário 2020). Lasswell (1970) mengartikan kebijakan publik yaitu program yang dapat digambarkan dengan tujuan-tujuan tertentu serta nilai-nilai tertentu dan juga praktik-praktik tertentu, kebijakan publik ditentukan oleh nilai-nilai yang terdapat didalam kebijakan tersebut dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan di praktekkan oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Menurut Thomas, Lavy, dan Strauss (1996) kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengubah keadaan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan dan perubahan dalam masyarakat, dan melibatkan proses perencanaan yang cermat, pembuatan keputusan yang berbasis data, implementasi yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak dan efisiensi pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan publik juga memerlukan transparansi, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang efektif agar dapat memperoleh dukungan dan pemahaman yang luas dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mengidentifikasi dalam pembuatan kebijakan. Pertama, pengambilan kebijakan terjadi apabila terdapat berbagai kendala (kurangnya sumberdaya, waktu, opini publik, konsistensi). Kedua, melibatkan berbagai proses kebijakan dengan beberapa pemangku kepentingan. Ketiga, kebijakan yang dijalankan akan berdampak pada kebijakan selanjutnya (Newton & Van Deth, 2019). Kebijakan publik adalah usaha pemerintah

dalam menghadapi berbagai permasalahan layanan publik melalui pengambilan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dengan pertimbangan yang matang. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam tidak hanya dalam proses pengambilan keputusan tetapi juga dalam menilai nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut. Dalam perspektif nilai, kebijakan publik merupakan langkah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif demi mencapai nilai bersama yang diutamakan. Pembuatan kebijakan publik menjadi salah satu fungsi paling vital dalam tata kelola pemerintahan, di mana kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan sangatlah penting. Pemahaman mereka terhadap prosedur-prosedur dan wewenang yang dimiliki juga menjadi faktor penentu dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam mengambil keputusan yang seringkali dilematis antara keuntungan dan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan publik.

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi adalah hasil dari penggabungan berbagai disiplin ilmu, seperti administrasi publik, manajemen publik, dan ilmu politik, seperti yang disebutkan oleh (Schofield & Sausman, 2004). Studi-studi ini dapat digolongkan sebagai penelitian tentang perubahan kebijakan, dengan implementasi dianggap sebagai tahap krusial dan penentu dalam siklus kebijakan (Jennings, 1987). Ripley dan Franklin (1982) menggambarkan implementasi sebagai langkah penting di antara proses pembuatan kebijakan dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Tiga Langkah dalam proses kebijakan menurut Ripley menempatkan tahap implementasi secara keseluruhan diantaranya tahap awal penyusunan agenda, tahapan kedua formulasi kebijakan, tahapan ketiga implementasi kebijakan dan tahapan terakhir adalah dampak dari kebijakan.

Model George C. Edwards III

Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan terkait Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), digunakan pendekatan teori yang diperkenalkan oleh Edwards III (1980) dalam bukunya yang berjudul *Implementing public policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel dalam kebijakan publik adalah Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bireucratic structure*)". Keempat faktor yang disebutkan di atas dijalankan secara bersamaan karena saling terkait satu sama lain, sehingga sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan seimbang, tanpa berlebihan atau kurang. Fokus utama kami adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan melalui memecahnya menjadi komponen prinsip yang lebih sederhana melalui eksplanasi. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang terus berubah dan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Kami mengidentifikasi sub-kategori dari faktor-faktor mendasar ini untuk memahami bagaimana setiap faktor memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Model yang diusulkan oleh George C. Edwards III, yang mencakup faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terbukti sangat relevan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh (Mazmanian & Sabatier, 1983) (Mazmanian & Sabatier, 1980) menyatakan bahwa implementasi adalah usaha untuk menjalankan keputusan kebijakan. Mereka menjelaskan bahwa implementasi melibatkan pelaksanaan

keputusan dasar kebijakan, yang biasanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga bisa berbentuk keputusan penting dari pengadilan atau Keputusan eksekutif. Idealnya, keputusan ini menentukan masalah yang akan diatasi, menetapkan tujuan yang akan dicapai, dan dalam berbagai cara, "membentuk" proses implementasi. Model Mazmanian dan Sabatier ini dikenal sebagai kerangka analisis implementasi. Variabel dependen mencakup tahapan dalam proses implementasi, yang terdiri dari pemahaman oleh lembaga pelaksana tentang kebijakan yang akan dijalankan, penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan terhadap objek, hasil nyata yang diperoleh, penerimaan terhadap hasil nyata tersebut, dan akhirnya, revisi terhadap kebijakan yang diterapkan.

Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle pada tahun 1980 dikenal sebagai pendekatan implementasi kebijakan sebagai sebuah proses politik dan administratif. Grindle menekankan keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan, yaitu apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Selain itu, kinerja implementasi kebijakan juga dipengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Model Donald Van Meter & Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan van meyer dan carl van horn yaitu proses implementasi abskyrasi yang mengejawantahkan kebijakanscara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang dilakukan secara verbal. Model van horn ini menjelaskan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh verbal yang saling berkaitan diantaranya sumber daya, organisasi pelaksana, sikap para pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana dan lingkungan social, ekonomi, serta politik. Model implementasi kebijakan yang dikenal sebagai "*A Model of Policy Implementation*," yang dirumuskan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975), adalah representasi abstrak dari proses pelaksanaan kebijakan. Model ini didesain untuk mencapai suatu kinerja implementasi yang tinggi melalui antara berbagai-bagian yang saling berinteraksi. Model ini mengasumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung secara terstruktur, dimulai dari keputusan politik, pelaksanaan, hingga kinerjanya.

Komunikasi

Kebijakan komunikasi berarti suatu proses penyampaian informasi dari pengambil kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2011). Menurut Edward III (1980) dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang efektif adalah yang melaksanakan kebijakan mengetahui mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan arahan implementasi sehingga disampaikan kepada personel sehingga dapat dipahami. Pentingnya penyampaian komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah agar informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami oleh para pelaksana, terutama dalam proses transmisi komunikasi.

Dimensi dari informasi perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan agar dapat dipahami, yaitu: a. Transformasi informasi (transmisi), mensyaratkan bahwa informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana tetapi juga kepada sasaran kelompok dan pemangku kepentingan. b. Kejelasan informasi agar informasi menjadi jelas dan mudah dipahami, serta menghindari salah tafsir dari pihak pelaksana, kelompok sasaran dan mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan. c. Konsistensi informasi mensyaratkan bahwa informasi harus konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan

bagi pelaksana, kelompok sasaran dan pemangku kepentingan. Komunikasi dalam pelaksanaan implementasi akan berjalan efektif apabila maksud dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang menjalankan kebijakan sehingga pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.

Disposisi

Perilaku dan karakteristik para pelaksana mempunyai peran yang penting dalam menjalankan implementasi kebijakan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Edwards III (1980) pandangan serta sikap para pelaksana terhadap kebijakan tersebut akan memengaruhi cara mereka melaksanakannya, terutama dalam konteks bagaimana mereka melihat kebijakan tersebut dalam hubungannya dengan kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Sikap yang positif dari para pelaksana akan mendukung implementasi yang efektif, karena mereka akan berusaha menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika sikap mereka tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik.

Karakteristik yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana adalah kejujuran dan komitmen. Kejujuran memastikan bahwa mereka terus melaksanakan program sesuai dengan yang telah direncanakan, sementara komitmen yang tinggi akan memberi mereka dorongan kuat untuk melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dukungan dari pimpinan memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Pimpinan yang mendukung kebijakan akan menempatkan kebijakan tersebut sebagai prioritas utama, memilih pelaksana yang mendukung program, dan memperhatikan keragaman dalam pemilihan pelaksana, termasuk dalam hal daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi lainnya. Selain itu, dukungan dana yang memadai memberikan insentif kepada para pelaksana program untuk mendukung dan sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi para pelaksana terhadap kebijakan juga merupakan faktor kunci dalam suksesnya implementasi kebijakan

Sumber daya

Sumber daya memainkan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (1980), tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi kebijakan, jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, maka implementasi tersebut akan kurang efektif. Sumber daya ini mencakup jumlah staf yang memadai dan memiliki keterampilan yang sesuai, informasi yang relevan dan cukup mengenai cara melaksanakan kebijakan, serta dukungan dari pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi. Selain itu, memiliki kewenangan yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuannya juga penting, serta memiliki fasilitas seperti bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya ini, implementasi kebijakan mungkin akan terhambat atau tidak berjalan dengan baik.

Ketika sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, dapat menghambat pelaksanaan program karena pengawasan menjadi kurang efektif. Dalam situasi di mana jumlah staf pelaksana terbatas, langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kemampuan para pelaksana melalui pelatihan

dan pengembangan keterampilan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Selain sumber daya manusia, kewenangan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana program akan dilaksanakan dan mengatur pengeluaran keuangan, termasuk alokasi dana, perekrutan staf, dan supervisi. Selain itu, fasilitas fisik seperti kantor dan peralatan juga diperlukan agar pelaksanaan kebijakan atau program dapat berjalan dengan lancar. Tanpa fasilitas yang memadai, pelaksanaan program mungkin akan mengalami hambatan yang signifikan.

Kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pengertian Program Keluarga Berencana (KB) menurut UU No. 52 tahun 2009 adalah iktir mengatur kelahiran anak, usia dan jarak ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui KIE, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hakreproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tujuan umumnya dari adanya program Keluarga Berencana adalah membentuk kelaurga sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan jarak kelahiran agar diperoleh satu keluarga yang sejahtera dan Bahagia. Program Keluarga Berencana yang diterapkan oleh pemerintah sangat bergantung pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran program tersebut. Salah satu faktor penghambat yang dapat muncul adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, yang dapat menjadi beban bagi pembangunan. Salah satu solusinya adalah melalui pengaturan jarak kelahiran dengan mengadopsi program Keluarga Berencana. Peserta KB Aktif, yang juga dikenal sebagai pengguna saat ini, merujuk kepada individu yang saat ini menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk mengatur kelahiran atau mencegah kehamilan, dan mereka masih dalam perlindungan kontrasepsi.

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB atau disebut juga BOKB merupakan alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional program-program prioritas nasional yang berhubungan dengan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Dana ini ditujukan kepada daerah tertentu agar mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan wewenang daerah dalam upaya meningkatkan pencapaian program Bangsa kencana di daerah. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk merencanakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur kelahiran, jarak antar kelahiran, usia ideal untuk melahirkan, dan mengatur kehamilan yang diinginkan.

Sejak tahun 2016, Program Keluarga Berencana telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). BOKB ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk mendukung pencapaian sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Kebijakan terkait BOKB dijelaskan dalam Petunjuk Operasional yang menjadi sangat penting agar dana ini dapat dimanfaatkan secara efektif dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun kegiatan yang didukung oleh BOKB meliputi operasional balai penyuluhan Keluarga Berencana, distribusi alokon (alat kontrasepsi), penggerakan di Kampung Keluarga Berencana, operasional Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Seksual (PPKBD dan SUB), dukungan manajemen, serta kegiatan informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menerapkan metode penelitian *mix methods* yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif (Moleong, 2018). Pada penelitian ini dilakukan penggabungan dua bentuk penelitian baik kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti juga bertujuan untuk memperkuat analisa penelitian dengan menekankan pada metode kualitatif. Pada penelitian ini data kualitatif untuk menjelaskan data kuantitatif. Dengan pendekatan deskriptif untuk mencari gambaran fenomena aktual dilapangan dan melakukan analisa.

Populasi dan Sample

Populasi dapat diartikan yaitu wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan (Sekaran & Bougie, 2003). Dalam konteks penelitian ini, populasi dianggap tidak memiliki batasan yang terukur (infinite). Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam menentukan batas wilayah atau jumlah individu yang terlibat dalam penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Kozak (2008). Seluruh petugas yang melaksanakan Kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kab. Subang sebagai populasi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada semua elemen atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik pengambilan sampel tersebut meliputi pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel kuota, pengambilan sampel acak, pengambilan sampel purposif, pengambilan sampel saturasi dan pengambilan sampel bola salju (Holmes-Smith, 2017). Batasan dalam metode *purposive sampling* ini adalah Pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan BOKB di Kab. Subang lebih dari 2 (dua) tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui survei elektronik dengan jumlah sampel yang digunakan berjumlah 200 responden sesuai dengan Holmes-Smith (2010). Menurut (Hair et al., 2011), sampel terdiri dari 200 responden yang merupakan pegawai yang bertugas mengimplementasikan kebijakan BOKB di Kabupaten Subang.

Responden Penelitian adalah petugas Keluarga Berencana yang berada di kabupaten Subang, yaitu Petugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-KB, Kepala UPTD P5A, Petugas Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB dengan perjanjian kerja, Petugas Kelompok Kegiatan (Poktan), Pos Keluarga Berencana Desa/Kelurahan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Tenaga Lini Lapangan. Adapun kuisisioner yang disebar baik secara online maupun secara offline dilakukan sebanyak 200 responden, namun lembaran kuisisioner yang balik dan diisi sesuai dengan kriteria penelitian terkumpul sebanyak 187 responden, dengan ketentuan: petugas yang bertugas di wilayah kabupaten subang, petugas yang melaksanakan implementasi kebijakan BOKB, serta telah melaksanakan kebijakan tersebut kurang dari 2 (dua) tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuantitatif

Analisis kuantitatif untuk digunakan menggambarkan tentang statistik data seperti nilai minimum, maksimum, jumlah, standar deviasi, varians, range, untuk mengukur distribusi data dengan skewness dan kurtosis (Setiawan et al., 2023). Menurut Sugiyono, (2017) mengatakan analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menyajikan data yang dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau generasi yang luas.

Metode yang perdigunakan untuk menilai implementasi kebijakan tentang BOKB merupakan konsep yang diusulkan oleh Edwards III (1980) dengan melihat implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ada tiga variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) untuk menilai dan menjelaskan impelmentasi Perban BKKBN 13 Tahun 2022 Tentang Juknis BOKB Tahun 2023.

Berdasarkan teori tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan terhadap output tercapai kurang dari 80% dari nilai idealnya 100%, dengan berbagai permasalahan dibawah ini:

Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan BOKB masih belum mencukupi, dapat dilihat dari segi kuantitas/jumlah aparatur, sehingga Bantuan Operasional di Kabupaten Subang masih belum optimal.

Penyediaan untuk pelaporan hasil serapan BOKB per triwulan di Aplikasi Morena BKKBN belum di up to date secara berkala;

Sosialisasi mengenai Pelaksanaan BOKB di kabupaten Subang masih belum terlaksana dengan maksimal, karena target penanganan laju pertumbuhan penduduk dan kesertaan peserta KB Aktif khusus di Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dikabupaten Subang cenderung menurun. Belum dibuatnya Petunjuk Pelasanaan dalam Pelaksanaan BOKB di Kab. Subang.

Kualitatif

Dalam penelitian ini, data kualitatif dianalisa melalui dokumentasi, wawancara dan observasi langsung. Berikut adalah beberapa informasi yang dikumpulkan:

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan Bangsa Kencanaa di Kabupaten Subang, khususnya terkait dengan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), mengungkapkan sejumlah isu yang perlu diperhatikan. Beberapa masalah yang teridentifikasi melibatkan aspek komunikasi, disposisi, serta sumber daya manusia dan sarana penunjang. Dalam analisis ini, fokus akan diberikan pada tiga aspek tersebut untuk menggali tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan program KB di Kabupaten Subang.

Dilihat dari aspek Komunikasi dan Sosialisasi, Pertama-tama, masalah komunikasi dan sosialisasi program BOKB di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sudah dilakukan hingga tingkat kecamatan, rendahnya tingkat pendidikan di sebagian wilayah masih menjadi kendala. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih terukur dan mendalam dalam sosialisasi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Pelatihan periodik dan sosialisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan BOKB.

Disposisi dan Kebijakan, dilihat dari segi disposisi dan kebijakan, keberadaan petunjuk teknis tetapi kurangnya petunjuk pelaksanaan di tingkat kabupaten menciptakan hambatan dalam implementasi BOKB. Ini mengindikasikan perlunya koordinasi yang lebih baik antara tingkatan pemerintahan dan peningkatan kesinambungan kebijakan dari tingkat nasional hingga lokal. Peran Dinas dan UPTDP5A sebagai fasilitator sangat penting untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan yang konsisten terhadap kebijakan BOKB.

Sarana penunjang dan Sumber Daya Manusia, merujuk pada sumber daya yang terbatas, khususnya dalam hal jumlah aparatur, menunjukkan ketidakcukupan dalam pengelolaan dana BOKB. Kurangnya personel menghambat efisiensi dan efektivitas

program KB dan pembangunan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualifikasi personel perlu dipertimbangkan untuk memastikan pelaksanaan program yang maksimal. Di sisi lain, sarana penunjang seperti sepeda motor, balai penyuluhan, dan peralatan lainnya telah disediakan melalui DAK Fisik Subbidang KB. Namun, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan optimalitas penggunaan sarana tersebut.

Selain itu, dilihat dari sisi Keterlambatan pada Kebijakan Implementasi BOKB, terdapat tantangan lain yang dihadapi adalah keterlambatan pengeluaran kebijakan BOKB. Kebijakan yang baru diumumkan pada bulan November memberikan waktu yang terbatas bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi alokasi dana ini ke dalam APBD yang tengah disusun. Kesulitan dalam mengalokasikan dana dengan cepat dapat menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan dan mengurangi efisiensi pelaksanaan. Hubungan yang berkesinambungan antara Kementerian BKKBN dengan pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi keterlambatan program.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Pengembangan kebijakan yang lebih detil dan petunjuk pelaksanaan yang jelas juga perlu diperhatikan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman pelaksanaan program di tingkat lokal. Selain itu, peningkatan jumlah serta peningkatan kualifikasi sumber daya manusia di tingkat lokal harus menjadi prioritas. Evaluasi rutin terhadap penggunaan sarana penunjang juga penting dalam memastikan optimalitas pelaksanaan BOKB di Kabupaten Subang. Dengan kerjasama yang baik dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, program KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Subang dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

Analisis Mix Method

Penelitian ini menggabungkan kedalam dua metode yang dinamakan mix method, dimana hasil analisis dari kedua data tersebut baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dibagi berdasarkan tiga dimensi, diantaranya: Komunikasi, Disposisi, dan Sumber Daya.

Dalam dimensi Komunikasi, mayoritas responden memberikan respons positif terhadap efisiensi pelaksanaan program KB, meskipun ada kelompok kecil yang merasa pelayanan belum memenuhi harapan mereka dalam hal kecepatan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam efisiensi pelayanan untuk memastikan kepuasan semua masyarakat. Terkait kejelasan, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pembuatan pertimbangan tertulis atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas KB. Namun, terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, menandakan perlunya perbaikan dalam komunikasi dan pertimbangan kebijakan. Dalam hal konsistensi, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas KB yang sesuai dengan prosedur pelayanan untuk BOKB. Namun, ada sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif terhadap konsistensi dalam sosialisasi kebijakan dari pusat hingga tingkat pelaksana. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme sosialisasi kebijakan.

Pada dimensi Disposisi, hasil penelitian menunjukkan variasi pendapat responden terkait dengan pelaksanaan pengangkatan birokrat oleh Dinas KB. Oleh karena itu, perlu ada lebih banyak dialog dan penelitian lanjutan untuk memahami perbedaan pandangan ini dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul terkait proses pengangkatan birokrat. Dalam hal pelaksanaan implementasi yang tidak memiliki dedikasi, responden

memiliki pandangan yang beragam, menyoroti pemahaman yang berbeda tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program KB. Oleh karena itu, Dinas KB dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dengan responden untuk memahami perspektif mereka. Terkait insentif, hasil penelitian menunjukkan variasi pendapat responden terkait dengan praktik pemberian anggaran tambahan oleh Dinas KB. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari pemberian anggaran tambahan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan BOKB.

Selanjutnya, dimensi Sumber Daya menunjukkan hasil analisis variasi dari pendapat responden terkait ketersediaan staf yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan BOKB dan informasi yang diberikan oleh tim pelaksana BOKB. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam komunikasi antara tim pelaksana dan pelaksana kebijakan untuk memastikan pemahaman yang efektif. Dalam hal wewenang, perbedaan persepsi responden mengenai sifat formal dari wewenang yang diberikan kepada tim pelaksana BOKB menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik untuk menjelaskan dan memastikan pemahaman yang konsisten. Terkait fasilitas, perbedaan persepsi responden tentang peran Dinas KB dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan BOKB menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebutuhan fasilitas dan peningkatan fasilitas yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan pentingnya meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan transparansi antara Dinas KB, tim pelaksana, dan masyarakat untuk memastikan implementasi kebijakan BOKB yang efektif dan berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus terhadap kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas, dan dana serta peningkatan praktik pendokumentasian juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan BOKB di tingkat lokal. Dengan memperdalam pemahaman ini melalui dialog dan komunikasi yang efektif, Dinas KB dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan, memastikan bahwa program KB dan Pembangunan Keluarga berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2022 Petunjuk Teknis BOKB TA 2023, terlihat bahwa pendekatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan masyarakat sangat beragam. Ini mengindikasikan pentingnya menyelaraskan program-program KB dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap wilayah. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, termasuk petunjuk teknisnya, merupakan langkah yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan di tingkat kabupaten. Penambahan sumber daya manusia dan optimalisasi sarana penunjang juga menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Subang

Dalam menghadapi semua tantangan ini, sinergi antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga non-profit, hingga masyarakat luas, sangat penting. Kolaborasi aktif dari berbagai pihak akan membantu mencapai tujuan bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan langkah-langkah yang tepat dan koordinasi yang lebih erat, implementasi kebijakan BOKB dan program-program KB memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Subang dan Indonesia secara keseluruhan.

Hasil analisis pelaporan triwulan I dan II dari Morena Kabupaten Subang

menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam progres penyerapan anggaran, terutama dalam operasional pelayanan KB yang mencapai tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam kegiatan seperti operasional di kampung berkualitas, penurunann stunting, dan operasional pembinaan program KB oleh kader yang masih memiliki progres penyerapan yang rendah. Penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana, memenuhi persyaratan pelaporan dengan baik, dan memastikan koordinasi yang erat antara OPD-KB dan BKKBN untuk mencapai target penyerapan anggaran yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam meningkatkan implementasi kebijakan BOKB dan pencapaian KB Aktif di Kabupaten Subang belum adanya koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait. Pemerintah pusat belum memberikan petunjuk teknis yang jelas dan mendukung pelaksanaan di tingkat daerah, sementara pemerintah daerah kurang merespons kebijakan dengan cepat dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas program KB dan pembangunan keluarga.

Dalam jangka panjang, penting untuk memperkuat pendekatan holistik terhadap program KB dan pembangunan keluarga. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antar sektoral dan partisipasi aktif masyarakat merencanakan dan melakukan program pembangunan keluarga.

Saran

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan Dana BOKB dan pelaksanaan KB menjadi lebih efektif dan memberikan pengaruh positif yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Subang dan Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut terkait implementasi kebijakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang, terdapat beberapa saran yang dapat membantu Dinas terkait di Kabupaten Subang dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut:

1. Penyempurnaan Petunjuk Teknis:
Adalah penting untuk melakukan revisi dan penyempurnaan petunjuk teknis kebijakan BOKB agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Keterlibatan ahli serta praktisi terkait dalam proses ini dapat memperbaiki efisiensi pelaksanaan.
2. Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya:
Sarankan peningkatan alokasi sumber daya manusia dan sarana penunjang yang sesuai untuk mendukung program KB dan pembangunan keluarga. Hal ini dapat mencakup pelatihan tambahan untuk staf, perbaikan infrastruktur, dan perluasan layanan.
3. Penguatan Koordinasi Antar-Instansi:
Tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan aliran informasi pemahaman yang lancar dan lebih baik mengenai pelaksanaan program. Pertemuan rutin, pelaporan berkala, dan mekanisme komunikasi yang efektif dapat membantu.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:
Dorong program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih kuat tentang perencanaan keluarga dan pentingnya KB. Ini bisa dilakukan melalui kampanye pendidikan dan program pemberdayaan keluarga.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala:

Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi perubahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Ini dapat membantu dalam penyesuaian yang tepat waktu dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

6. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pastikan bahwa seluruh proses alokasi dana dan pelaporan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini termasuk melampirkan rincian SP2D sesuai dengan ketentuan yang ada.

7. Kerjasama Lintas Sektor:

Tingkatkan kerjasama lintas sektoral antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga non-profit, dan sektor swasta. Ini akan memungkinkan penggabungan sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P., Chisholm, D., & Fuhr, D. C. (2009). Effectiveness And Cost-Effectiveness Of Policies And Programmes To Reduce The Harm Caused By Alcohol. *The Lancet*, 373(9682), 2234–2246.
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal Of Educational Management*, 1(2), 85–102.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly. Inc.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man And His Government: An Empirical Theory Of Politics*. (No Title).
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed A Silver Bullet. *Journal Of Marketing Theory And Practice*, 19(2), 139–152.
- Holmes-Smith. (2017). *Politics And Policy Implementation In The Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Imperial, M. T. (2021). Implementation Structures: The Use Of Top-Down And Bottom-Up Approaches To Policy Implementation. In *Oxford Research Encyclopedia Of Politics*.
- Jennings, B. (1987). Interpretation And The Practice Of Policy Analysis. *Confronting Values In Policy Analysis: The Politics Of Criteria*, 128–152.
- Knill, C., & Tosun, J. (2008). *Policy Making*.
- Lajas, R., & Macário, R. (2020). Public Policy Framework Supporting “Mobility-As-A-Service” Implementation. *Research In Transportation Economics*, 83, 100905.
- Lasswell, H. D. (1970). The Emerging Conception Of The Policy Sciences. *Policy Sciences*, 1(1), 3–14.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). A Multivariate Model Of Public Policy-Making. *American Journal Of Political Science*, 439–468.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation And Public Policy*. (No Title).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. DR. Lexy J. Moleong, MA.
- Newton, K., & Van Deth, J. W. (2019). *Perbandingan Sistem Politik; Teori Dan Fakta*. Nusamedia.
- Muhamad Khalisah (2020). Efektivitas pemanfaatan Dana bantuan Operasional keluarga berencana (BOKB) dalam pelaksanaan Prorgam Kelaurga Berencana dan

- Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bireueun Provinsi Aceh.
- Nugroho, A. P., Lestari, H., & Santoso, S. (2012). Implementasi Kebijakan Transmigrasi Umum Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(2), 81–90.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy And Policy Implementation*. (No Title).
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Puskesmas. *Jurnal Kehumasan Universitas Pendidikan Indonesia*, 3(1), 71–92.
- Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium On Implementing Public Policy: Learning From Theory And Practice: Introduction. *Public Administration*, 82(2), 235–248.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2003). Research Methods For Business 5th Ed: A Skill Building Approach. *Journal Of Education Business*, 68(5), 316–317.
- Setiawan, Z., Tahir, R., Prayitno, A., Thamrin, S., Gidion, P., Sari, D. M., & Indahyani, T. (2023). *METODE CAMPURAN DALAM PENELITIAN: Menggabungkan Kekuatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal Of Public Administration*, 3, 58–71.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225, 87.
- Thomas, D., Lavy, V., & Strauss, J. (1996). Public Policy And Anthropometric Outcomes In The Cote d'Ivoire. *Journal Of Public Economics*, 61(2), 155–192.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).